



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal;
- b. bahwa Pemerintah Daerah menerapkan standar pelayanan minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pemerintah daerah sesuai dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah, perlu mengatur rencana aksi berkaitan dengan penerapan standar pelayanan minimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2028.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan

rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
12. Rencana Pembangunan Daerah adalah Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Pasal 2

- (1) Bupati berwenang membentuk Tim Penerapan SPM di Daerah.
- (2) Bupati melalui tim penerapan SPM menyusun dan mengkoordinasikan rencana aksi penerapan SPM di Daerah.
- (3) Renaksi penerapan SPM sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (4) Ketentuan mengenai Renaksi penerapan SPM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan rencana aksi penerapan SPM di Daerah bersumber dari :

- a. APBD
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 2 September 2024

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGGARA,

Cap/ttd

JASMONO

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 2 September 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

NICODEMUS UBRO

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 NOMOR
58



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA



RENCANA AKSI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023 - 2027

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM) Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	2
1.3. Kondisi Umum Wilayah	2
1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah	2
1.3.2. Topografi	3
1.3.3. Hidrologi	4
1.3.4. Demografi	5
1.3.5. Kawasan Rawan Bencana	6
1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	7
1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM	10
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	11
2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM	11
2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM	15
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM	18
3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi	18
3.2. Materiks Rencana Aksi Penerapan SPM	31
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM ..	54
4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM	54
4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	60

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022	11
Tabel 2.2	Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022	12
Tabel 2.3	Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022	13
Tabel 2.4	Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022	13
Tabel 2.5	Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022	14
Tabel 2.6	Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022	14
Tabel 3.1	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2027	30
Tabel 3.2	Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2027	33
Tabel 3.3	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2027	37
Tabel 3.4	Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara 2013-2027	39
Tabel 3.5	Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2027	40
Tabel 3.6	Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2027	44
Tabel 4.1	Evaluasi pencapaian indikator SPM	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak wajib bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, Jenis SPM terdiri atas Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah pada Pasal 298 ayat 1 yaitu “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Minimal..

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM bahwa untuk menjawab isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*. Salah satu bentuk perwujudan dari Permendagri tersebut adalah dengan menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Secara Astronomis, Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi koordinat 131° - 133° 5' Bujur Timur dan 5° - 6.5° Lintang Selatan. Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi yang cukup strategis, diapit oleh dua buah lautan besar yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 Laut Banda dan WPP 718 di Laut Arafura.

Secara geostrategik, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting yang cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia sehingga ke depannya perlu meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

Sedangkan sesuai Data BPS yang dirincikan menurut kecamatan tahun 2022 luas wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 1.098,22 km² dengan jumlah pulau sebanyak 83 pulau dan garis pantai sepanjang 632,15 km. Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara saat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1953 sebesar 1.848.575,8 km², kemudian mengalami perubahan beberapa kali akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah.

Kabupaten Maluku Tenggara terdiri atas 11 kecamatan. Kecamatan dengan luas administrasi terbesar adalah Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebesar 16 persen dan porsi luasan terkecil Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebesar 3 persen.

Jumlah Ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 192 Ohoi dan 1 Kelurahan. Jumlah Ohoi terbanyak ada di wilayah Kecamatan Kei Besar, diikuti Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah ohoi paling sedikit adalah Kecamatan Manyeu yaitu sebanyak 9 Ohoi. Jarak tempuh terjauh dari Ibu Kota Kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten adalah Ibu Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di Tanah Kei yang dikenal dengan Hukum Larwul Ngabal. Jauh sebelum lahir Hukum Positif di Negara Indonesia yang dikenal dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Hukum Adat Larwul Ngabal telah ada dalam mengatur perikehidupan masyarakat Etnis Kei. Hukum Adat Larwul Ngabal mengatur tentang pemerintahan adat, hak ulayat adat, Batas Tanah, Pergaulan lawan jenis, pelestarian lingkungan hidup dan menjaga batas laut dan darat serta perkawinan dan lain-lain (Bat-batang Fit Roa-Fit Nangan (J.P. Rahail, 95)).

Dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan, 192 ohoi pada 11 kecamatan tersebut di atas, adalah penjelmaan dari 86 Ohoi La'ay (Desa Induk) dan 106 Ohoi Soa (dusun) yang berada dibawah kekuasaan adat 22 Ratschaap dan dipimpin oleh Rat/Raja. 22 Ratschaap ini tersebar di Pulau Kei Besar, Pulau Kei Kecil, Pulau Dullah, Pulau Kur, dan Pulau Tam. 16 Ratschaap diantaranya berada di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara yang diuraikan sebagai berikut.

1.3.2. Topografi

Topografi antara Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil relatif berbeda, Topografi Pulau Kei Kecil cenderung datar dan landai dengan ketinggian berkisar 0 s.d 100 M di atas permukaan laut, terdapat beberapa bukit rendah di bagian tengah dan bagian utara pulau dengan ketinggian mencapai 115 M. Kemiringan daratan Pulau Kei Kecil berkisar 0 – 25 derajat dengan kategori landai. Adapun topografi Pulau Kei Besar adalah daerah berbukit dan bergunung yang membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata-rata 500 - 800 M. puncak tertinggi adalah Gunung Dab, sedangkan dataran rendah hanya merupakan jalur sempit sepanjang pesisir pantai, dengan jarak rata-rata dari pantai berkisar 100 meter. Kemiringan daratan Pulau Kei Besar dikategorikan curam dan sangat curam dengan tingkat kemiringan mencapai kisaran 15-45 derajat dan lebih dari 45 derajat pada beberapa titik.

Karakteristik geologi Kabupaten Maluku Tenggara terbentuk/tersusun dari jenis tanah meliputi Podzolik, Rensina dan Lithosol sedangkan jenis batuan meliputi Aluvium Undak, Terumbu Coral, Seklis Habluk, Paleogen dan Ulagan Paleozoikum.

Sedangkan menurut struktur dan tipologi daerah, Maluku Tenggara terbagi atas tiga jenis, yaitu Dataran Pantai, yang merupakan ruang sempit disepanjang pesisir, dengan luasan kurang lebih 1 persen dari total luas daratan; perbukitan struktural, secara umum di Pulau Kei Kecil bagian selatan dan barat, dengan luasan 44 persen dari luas daratan, serta perbukitan karst, yang terbentang di Pulau Kei Besar dan sebagian kecil dari bagian utara pulau Kei Kecil dengan luasan mencapai 55 persen dari luas daratan.

1.3.3. Hidrologi

Kabupaten Maluku Tenggara memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang tersebar baik di Pulau Kei Besar maupun Kei Kecil. Pulau Kei Besar dengan karakteristiknya, memiliki cukup banyak sumber mata air.

Secara khusus di bagian tengah dan selatan pulau Kei Besar, serta beberapa titik di bagian utara. Kei Besar Bagian Tengah terdiri dari Sungai Wear Renfaal, Sungai Mataholat, Sungai Wetuar, Sungai Erlarang. Kei Besar Bagian Selatan Sungai Weduar. Kei Besar bagian Utara, Sungai Wear Hollay dan Sungai Ur. Sedangkan di wilayah Pulau Kei Kecil, terdapat setidaknya 5 sungai dengan debit air yang cukup besar, yakni Sungai Nen Mas II, Sungai Warwut, Sungai Wear Semawi, Sungai Wear Hoarten dan Sungai Jatwav.

Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara juga memiliki satu buah danau yaitu Danau Ablel di Kecamatan Manyeuw serta beberapa mata air yang berada di Kecamatan Kei Besar. Dalam kaitan dengan struktur Geologi, analisis Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih bagi keberlanjutan hidup, menunjukkan bahwa hasil perhitungan indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH) Wilayah dengan basis ekoregion diperoleh nilai 0,24 yang diasumsikan sebagai baseline jika dibandingkan dengan input basis ekoregion dan tutupan lahan diperoleh nilai sebesar 0,25 yang merupakan rata-rata hasil perhitungan dari Pulau Kei Besar dan pulau-pulau Kei Kecil.

Jika dilakukan perhitungan secara terpisah diketahui bahwa indeks untuk pulau Nuhu Yuut (Kei Besar) adalah berkisar antara 0,29-0,44 sedangkan untuk pulau-pulau Nuhu Roa (Kei Kecil) berkisara antara 0,08-0,24. Hal ini disebabkan oleh faktor tutupan lahan di Kepulauan Kei yang masih berhutan sebesar 42% dan karakter bentang lahan perbukitan karst dan perbukitan struktural dengan persentase masing-masing 55 persen dan 44 persen dari luas daratan Kepulauan Kei.

Iklim di kawasan Kabupaten Maluku Tenggara dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura, dan Samudra Indonesia serta dibayangi Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di bagian Selatan sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan. Keadaan musim di Kabupaten Maluku Tenggara adalah.

- 1) Musim Timur atau musim kemarau berlangsung dari Bulan April-Oktober.
- 2) Musim Barat atau musim hujan berlangsung berlangsung dari Bulan Oktober–Februari dengan intensitas tertinggi pada Bulan Desember dan Februari.
- 3) Musim Pancaroba berlangsung dalam Bulan Maret/April dan Oktober/November.

Angin kencang bertiup pada Bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora. Kondisi angin di Kabupaten Maluku Tenggara adalah.

- 1) Bulan April-Oktober bertiup Angin Timur Tenggara.
- 2) Bulan April-September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91 persen dimana dominasi angin Tenggara sebesar 61 persen.
- 3) Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat Laut sebanyak 50 persen dimana dominasi angin Barat Laut sebesar 28 persen.

Curah Hujan antara 2.000-3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil sedangkan di Pulau Kei Besar curah hujannya diatas 3.000 mm pertahun. Tahun 2011 Curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 3.121 mm per tahun atau rata-rata 260,1 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan sebanyak 211 hari atau rata-rata 17,58 hari hujan per bulan.

1.3.4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021, sesuai data hasil sensus adalah sebesar 123.418 jiwa. Sedangkan menurut pencatatan sipil, sebanyak 128.101 jiwa. Kondisi kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 – 2021.

Jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 124.199 jiwa dibandingkan dengan luas wilayah (daratan) Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 1.098,21 Km², maka diperoleh kepadatan penduduk Maluku Tenggara sesuai data BPS sebesar 120 jiwa/Km.

Persebaran Penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara relatif tidak merata, baik dalam lingkup kecamatan, maupun dalam lingkup perbandingan antar pulau (Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar). Pulau Kei Kecil didiami sekitar 57,8 persen penduduk Maluku Tenggara. Pulau Kei Besar didiami 42,2 persen penduduk.

Kecamatan yang paling banyak didiami penduduk adalah kecamatan Kei Kecil. Total sebanyak 33.386 jiwa penduduk tinggal di kecamatan Kei Kecil, atau sebesar 26,88 persen dari total penduduk Maluku Tenggara. Kecamatan Kei Besar Selatan Barat adalah kecamatan yang didiami penduduk paling sedikit. Tahun 2022 jumlah penduduk yang tinggal di kecamatan Kei Besar Selatan Barat berjumlah 3.703 jiwa atau sebesar 2,98 persen dari total jumlah penduduk.

Komposisi penduduk menurut kelompok umum menunjukkan bahwa Tahun 2022 kelompok umur yang paling dominan adalah pada rentang 10

s.d 34 tahun. Penduduk yang berada di rentang umur tersebut mencapai 57.431 jiwa, atau sebesar 46,2 persen dari total penduduk.

Perbandingan yang sama juga terjadi pada kelompok umur sesuai jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki, jumlah penduduk pada kelompok umur 10 s.d 34 tahun mencapai 29.486 jiwa, atau sebesar 47,73 persen. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan kelompok umur 10 s.d 34 berjumlah 27.945 jiwa atau mencapai 44,77 persen.

Perhitungan Rasio Ketergantungan Total yang mencapai angka 48,88 menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun awal RPJMD yang tercatat Rasio Ketergantungan di Kabupaten Maluku Tenggara mencapai angka 68,66 pada tahun 2017. Fakta ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Maluku Tenggara di tahun 2021 berada pada, dan/atau sudah memasuki periode Bonus Demografi. Olehnya itu, kebijakan untuk membuka lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM siap pakai, serta penguatan aspek pemberdayaan masyarakat adalah hal wajib di dalam tahun-tahun pembangunan saat ini.

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

1. Bencana Alam Angin Puting Beliung

Beberapa Wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah yang rawan berpotensi terkena Angin puting beliung yang diakibatkan adanya Pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km/jam atau lebih. Terutama di Wilayah Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Selain itu Bencana ini tidak bisa dianggap sepele karena bisa menimbulkan kerusakan infrastruktur dan korban jiwa. Jadi bisa dibilang bahwa angin puting beliung atau yang biasa disebut juga dengan angin puyuh, angin ribut, angin leysus/leses ini merupakan sebuah kejadian alam yang cukup berbahaya.

2. Bencana Alam Tanah Longsor

Potensi bencana longsor di Kabupaten Maluku Tenggara yang diakibatkan oleh kondisi alam yaitu intensitas curah hujan, kemiringan lereng dan jenis tanah dengan klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor, yaitu kawasan dengan potensi tinggi untuk mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terpadat konstruksi bangunan sangat penting, pada lokasi seperti ini sering mengalami gerakan tanah (longsoran), terutama pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi. Kawasan tingkat kerawanan sedang adalah kawasan yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah adalah potensi gerakan tanah yang tinggi,

namun tidak ada resiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan bangunan.

3. Bencana Alam Banjir

Beberapa wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan daerah rawan bencana banjir. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan manusia terjadi sebagai akibat aktualisasi beberapa faktor yaitu: hujan, kondisi sungai/Gorong-gorong, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Selain faktor-faktor tersebut di atas, banjir juga kerap terjadi karena sifat alami wilayahnya, seperti bentuk dan luas daerah aliran sungai yang terpadu dengan curah hujan yang tinggi.

4. Bencana Rawan Gelombang Pasang

Berdasarkan hasil analisis gelombang pasang deliniasi daerah gelombang pasang menggunakan jarak terjauh yakni daerah terpengaruh gelombang, dengan jarak yang digunakan adalah 1 km dari garis pantai. Keberadaan mangrove mempengaruhi besarnya potensi resiko terhadap bahaya gelombang pasang. Dengan adanya keberadaan hutan mangrove primer maupun sekunder dapat meminimalisir gelombang pasang yang terjadi. Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai gelombang pasang tertinggi yaitu 3 - 4 meter dari garis pantai dan masuk dalam tingkat rawan bagi masyarakat yang bermukim pada wilayah pesisir. Namun hutan mangrove primer dan sekunder menjadi salah satu bagian yang mampu mengurangi tinggi gelombang pasang, sehingga kawasan hutan mangrove memiliki potensi untuk dilindungi karena mampu mengurangi tingginya gelombang pasang.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekoonomi (LPE)

Nilai PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2022 sebesar Rp2.148.920.000.000, mengalami kenaikan sebesar Rp114.914.450.000, dibanding Tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp2.034.005.550.000. Kenaikan pada PDRB ADHK, sekaligus menjadi

gambaran pertumbuhan perekonomian daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2021-2022.

Lapangan usaha yang berkontribusi terbesar kedua adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 24,79 persen. Pada lapangan usaha ini, seluruh aktivitas pelayanan publik dan administrasi perkantoran pemerintah daerah terhitung di dalamnya.

Adapun lapangan usaha dengan kontribusi paling kecil adalah pengadaan listrik dan gas yang tercatat sebesar 0,08 persen. Kontribusi ini dipengaruhi oleh karena penyediaan listrik untuk rumah tangga, perkantoran dan faktor besar menggunakan listrik yang disediakan oleh PT.PLN.

Kontribusi lapangan usaha untuk perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019 s.d 2022 baik atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan.

Dari data kontribusi pada Tabel di atas, diperoleh gambaran kontribusi faktor bagi total PDRB Maluku Tenggara. Berikut lima faktor dominan pembentuk struktur ekonomi daerah hanya sampai tahun 2020 dan untuk Tahun 2022 sampai dengan saat ini data belum dirilis.

b. PDRB Perkapita

Tahun 2020 sesuai dengan hasil sensus penduduk, maka terdapat koreksi terhadap jumlah penduduk Maluku Tenggara. Sebelumnya, sesuai proyeksi berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 serta survey antarsensus tahun 2015, jumlah penduduk Maluku Tenggara masih berada di bawah 100.000 jiwa. Perubahan jumlah penduduk mengakibatkan terjadinya penyesuaian terhadap formula perhitungan PDRB Perkapita.

Fluktuasi PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2019 s.d 2022.

c. Laju Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Secara umum Inflasi terjadi sebagai akibat dari, 1) Tarikan Permintaan dan 2) Dorongan Penawaran. Permintaan yang tinggi melebihi penawaran (pasokan) akan mengakibatkan harga naik. Hal ini umumnya terjadi pada bulan-bulan dimana terdapat hari besar keagamaan.

Tahun 2022 dalam perhitungan tahun ke tahun (yoy), Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 4,52 persen, mengalami kenaikan dibanding Tahun 2021 sebesar 3,45 persen. Adapun laju inflasi Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 4,52 persen, masih berada di bawah inflasi Provinsi Maluku sebesar 6,28 persen dan inflasi nasional 5,51 persen.

Dalam tahun 2022, jenis barang dan jasa yang paling dominan menyumbang inflasi antara lain: bahan pangan (ikan dan sayur), harga tiket angkutan udara, rokok, bahan bangunan, pakaian Wanita, dan BBM. Selengkapnya, barang dan jasa penyumbang inflasi terbesar tahun 2023.

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Maluku Tenggara dalam 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan. Tahun 2019 IPM Maluku Tenggara sebesar 65,85 naik menjadi 66,88 pada Tahun 2022. Meskipun terus mengalami kenaikan, secara nasional IPM Maluku Tenggara berada di peringkat 408 secara nasional di antara 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Kenaikkan nilai IPM ini didorong oleh peningkatan pada indikator pembentuknya. Dalam periode 2019 s.d 2022, rata-rata pertumbuhan indikator komposit IPM sebesar 0,65 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada indikator Pengeluaran Riil Perkapita sebesar 1,04 persen. Pertumbuhan paling lambat adalah indikator Usia Harapan Hidup yang tumbuh sebesar 0,27 persen. Berikut disajikan data IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019–2022, beserta indikator pembentuknya.

e. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.

Di Kabupaten Maluku Tenggara, pada Tahun 2022 Jumlah angkatan kerja sebanyak 44.551 orang. Yang bekerja sebanyak 41.994 orang, sedangkan yang tidak bekerja sebanyak 2.557 orang. Sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 sebesar 5,74 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 sebesar 5,74 persen mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 sebesar 5,06 persen. Kenaikan ini dipicu oleh jumlah penduduk yang bekerja berkurang dari 43.715 orang pada tahun 2021 turun menjadi

41.994 orang di tahun 2022. Atau ada 1.721 orang yang berhenti bekerja atau kehilangan pekerjaan di tahun 2022.

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 sebesar 5,74 persen, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Maluku dan Nasional, menunjukkan bahwa TPT Kabupaten Maluku Tenggara masih berada di bawah Provinsi dan Nasional.

f. Kemiskinan

1. Kemiskinan Makro

Dengan GK sebesar Rp595.041, penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 sebanyak 21.380 orang, atau sebesar 21,19 persen. Tingkat Kemiskinan Tahun 2022 sebesar 21,19 persen mengalami penurunan dibanding Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 sebesar 22,73 persen.

Penurunan ini sekaligus menjawab adanya penurunan dari sisi jumlah penduduk miskin. Tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 22.890 orang, turun menjadi 21.380 orang. Sejumlah 1.510 orang yang berhasil dikeluarkan dari kemiskinan.

Pengukuran Tingkat Kemiskinan dalam lingkup Provinsi Maluku menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Tingkat Kemiskinan Tertinggi ada di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 27,64 persen. Tingkat Kemiskinan paling rendah ada di Kota Ambon, sebesar 4,68 persen. Kabupaten Maluku Tenggara berada di posisi ke-5 tertinggi di antara 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.

Dari sisi jumlah penduduk miskin, maka Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin paling banyak adalah Kabupaten Maluku Tengah, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 65.730 orang. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah Kabupaten Buru Selatan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 9.350 orang.

Dari jumlah penduduk miskin Provinsi Maluku Tahun 2022 sebanyak 296.660 orang, dapat diklasifikasikan kontribusi dari setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku. Kabupaten yang menyumbang atau berkontribusi paling besar untuk jumlah penduduk miskin provinsi maluku tahun 2022 adalah Kabupaten Maluku Tengah, sebesar 22,62 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang berkontribusi paling sedikit adalah Kabupaten Buru Selatan dengan kontribusi sebesar 3,22 persen. Kabupaten Maluku Tenggara berada di urutan ke-8 dengan besaran kontribusi sebesar 7,36 persen.

2. Kemiskinan Ekstrim

Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim di Maluku Tenggara, sesuai data yang diperoleh, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki total 11.815KK miskin ekstrim. Terdiri dari Desil 1 sebanyak 4.379KK, Desil 2 sebanyak 4.815KK dan Desil 3 sebanyak 2.621KK.

Dari sisi riil jumlah penduduk, Total 3 Desil terbawah berjumlah 59.103 jiwa dengan penduduk pada Desil 1 sebanyak 27.902 jiwa.

1.4. Tugas dan Fungsi Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Maluku Tenggara 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.
Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota										
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6(Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Maluku Tenggara	8.018	2.652	33,07%	22.585	11.413	50,55%	2.273	2.273	100%		-

2.1.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2. Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Maluku Tenggara	2716	2220	81.74	2592	1976	76.23	2469	2000	81	12759	9606	75.29	3855	3844	99.71	85257	63217	74.15	9314	7356	78.98

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
37009	11312	30.57%	775	701	90.45	90	90	100	2160	1639	75.88	4880	3420	70.08	13.405.958.519	13.203.269.514

2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3. Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Maluku Tenggara	117.307	83.402	71%	26.453	17.724	67%	15.629.088.900	15.627.668.154

2.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4. Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Maluku Tenggara	62	62	100%	1	1	100%	50.000.000	50.000.000

2.1.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5. Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Maluku Tenggara	137	37	27%	37.775	37.775	100%	35	35	100%	4.089	4.089	100%	25	25	100%	2.630.035.476	2.603.057.796

2.1.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6. Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Maluku Tenggara	1.269	1.269	100%	1.020	1.020	100%	1.166	1.166	100%	450	450	100%	2.861	2.861	100%	4.708.550.038	4.520.943.865

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Maluku Tenggara ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Pendistribusian tenaga guru yang belum optimal dan merata pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) terutama pada wilayah kei besar serta pulau – pulau diwilayah kei kecil;
- 2) Minimnya tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memenuhi standar kompetensi;
- 3) Terbatasnya akses dan sarana prasarana pendidikan pada sekolah sekolah diwilayah kei besar dan pulau – pulau;
- 4) Masih rendahnya peran serta Orang Tua terhadap perkembangan Pendidikan Anak sehingga masih banyak anak usia sekolah yg tidak bersekolah;
- 5) Minimnya anggaran yang dialokasikan pada sekolah PAUD, SD dan SMP di daerah.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan alokasi anggaran penyediaan sarana dan prasarana peralatan medis dan non medis pada Pusat Kesehatan;
- 2) Minimnya sarana pendukung listrik, internet, komunikasi dan alat transportasi;
- 3) Belum terpenuhinya SDM penyuluh yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sarana prasarana Kesehatan yang belum lengkap;
- 4) Kurangnya pemahaman terhadap pelaporan Kesehatan terutama pada faskes;
- 5) Kurangnya pemahaman terhadap pengumpulan data jumlah penduduk.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Maluku Tenggara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas;
- 2) Belum tersedianya basis data yang akurat untuk perhitungan capaian SPM yang indikatornya adalah jumlah jiwa yang terlayani. Perhitungan SPM di Dinas PUTR masih bersifat asumsi yaitu data dalam satuan KK/SR dengan asumsi 1 KK mewakili 4 jiwa;
- 3) Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan SPM terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan sehingga indikator layanan belum tercapai dan Tidak semua nomenklatur kegiatan/sub kegiatan untuk pemenuhan SPM PU dapat dianggarkan karena berdasarkan pemetaan oleh daerah memang tidak diperlukan/berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Untuk pemenuhan SPM Air Minum terdapat daerah yang pelaksanaan pemenuhannya dilaksanakan oleh PDAM sehingga tidak memerlukan anggaran yang dialokasikan di OPD;
- 4) Terbatasnya sumber mata air, sehingga membutuhkan anggaran yang besar untuk pemenuhan pelayanan air bersih;
- 5) Kurangnya jumlah SDM yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya alokasi anggaran;
- 2) Kurangnya SDM pada OPD dalam Pendataan dan Penanganan Rumah Korban Bencana di lapangan.
- 3) Belum Sinkronnya Tupoksi program, kegiatan dan sub kegiatan kebencanaan antar OPD;
- 4) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai;
- 5) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan;
- 6) Status Tanah yang tidak jelas;
- 7) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Maluku Tenggara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur penyelenggara ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- 2) Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja dalam kaitannya dengan Projustitia;
- 3) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- 4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- 5) Kurangnya Sinergitas lintas Organisasi Perangkat Daerah dalam menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Belum optimalnya pemenuhan standar operasional prosedur bagi aparatur dalam melakukan tugas-tugas operasional di lapangan;
- 7) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 8) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 9) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai;
- 10) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Maluku Tenggara berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya tenaga penyuluh sosial dan pekerja sosial;
- 2) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM;
- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 4) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM, khususnya pendukung rehabilitasi sosial dan Kendaraan khususnya layanan rehabilitas sosial dasar diluar panti belum dimiliki oleh Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) disabilitas, anak dan lanjut usia;
- 5) Kurangnya Lembaga kesejahteraan sosial khususnya pada wilayah pulau kei Besar;

- 6) Data penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis diluar data terpadu kesejahteraan social (DTKS) belum terdata secara baik;
- 7) Pelayanan dukungan psikis sosial bagi korban bencana, paska bencana belum dilaksanakan secara baik dikarenakan kurangnya koordinasi penanganan lanjut usia di bidang Kesehatan;
- 8) Jumlah korban bencana alam dan bencana social di tahun 2022 sangat tinggi;
- 9) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta PMK Nomor 212/PMK07/2022 tentang indikator tingkat kinerja Daerah dan ketentuan umum Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023.

3.1.1.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Maluku Tenggara Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Angka P{artisipasi Sekolah	1 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Peserta didik
			2 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Kegiatan
			3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	
			1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
	Program SPM Pendidikan Kesenjangan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesenjangan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesenjangan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesenjangan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesenjangan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk	Pendidik dan tenaga kependidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
	KESEHATAN MASYARAKAT	Kabupaten/Kota	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			8	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21	Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari
			11	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari
			12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Program Kabupaten/Kota	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen
			6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
			7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen
			10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang
			11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
			2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
			6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen
		Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
			6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
	NON KEBAKARAN	dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
			2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaa n Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggar aan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayak an Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi	Unit

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial.

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima a Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Pendidikan Anak Usia Dini			2,650	2,650			1,404,000,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	2,700	2,700			1,450,000,000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi sekolah	%				100.00	100.00	514,000,000						100.00	100.00	550,000,000			
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%				45.66	45.66	100,000,000						68.49	68.49	100,000,000			
c	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%				100.00	100.00	500,000,000						100.00	100.00	500,000,000			
d	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%				60.00	60.00	100,000,000						80.00	80.00	100,000,000			
e	Kecukupan formasi guru ASN	%				83	83	100,000,000						91.67	91.67	100,000,000			
f	Indeks Distribusi Guru	%				80.00	80.00	90,000,000						100.00	100.00	100,000,000			
g	Proporsi PTK bersertifikat	%				-	-	-						-	-	-			
h	Proporsi PTK penggerak	%				-	-	-						-	-	-			
i	Pengalaman pelatihan guru	%				-	-	-						-	-	-			
2	Pendidikan Dasar			22,627	22,627			15,100,000,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	22,750	22,750.00			16,000,000,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD			14,877	14,877			10,700,000,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	14,950	14,950			11,300,000,000			
a	Angka partisipasi kasar	%				100.00	100.00	3,100,000,000						100.00	100.00	3,300,000,000			
b	Angka partisipasi sekolah	%				100.00	100.00	3,100,000,000						100.00	100.00	3,300,000,000			
c	Angka partisipasi murni	%				100.00	100.00	3,100,000,000						100.00	100.00	3,300,000,000			
d	Kemampuan literasi	Nilai				66.67	66.67	350,000,000						66.67	66.67	350,000,000			
e	Kemampuan numerasi	Nilai				56.67	56.67	350,000,000						56.67	56.67	350,000,000			
f	Perbedaan skor literasi	Nilai				100.00	100.00	250,000,000						100.00	100.00	250,000,000			
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai				100.00	100.00	250,000,000						100.00	100.00	250,000,000			
h	Indeks iklim keamanan	Nilai				66.67	66.67	100,000,000						66.67	66.67	100,000,000			
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai				83.33	83.33	100,000,000						83.33	83.33	100,000,000			
j	Kecukupan formasi guru ASN	%				-	-	-						-	-	-			
k	Indeks Distribusi Guru	%				-	-	-						-	-	-			
l	Proporsi PTK bersertifikat	%				-	-	-						-	-	-			
m	Proporsi PTK penggerak	%				-	-	-						-	-	-			
n	Pengalaman pelatihan guru	%				-	-	-						-	-	-			
	SMP			7,750	7,750			4,400,000,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	7,800	7,800			4,700,000,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%				100.00	100.00	1,000,000,000						100.00	100.00	1,100,000,000			
b	Angka partisipasi sekolah	%				100.00	100.00	1,000,000,000						100.00	100.00	1,100,000,000			
c	Angka partisipasi murni	%				100.00	100.00	1,000,000,000						100.00	100.00	1,100,000,000			
d	Kemampuan literasi	Nilai				66.67	66.67	350,000,000						100.00	100.00	350,000,000			
e	Kemampuan numerasi	Nilai				66.67	66.67	350,000,000						100.00	100.00	350,000,000			
f	Perbedaan skor literasi	Nilai				100.00	100.00	250,000,000						100.00	100.00	250,000,000			
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai				100.00	100.00	250,000,000						100.00	100.00	250,000,000			
h	Indeks iklim keamanan	Nilai				83.33	83.33	100,000,000						96.67	96.67	100,000,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima a Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai				83.33	83.33	100,000,000						96.67	96.67	100,000,000			
j	Kecukupan formasi guru ASN	%				-	-	-						-	-	-			
k	Indeks Distribusi Guru	%				-	-	-						-	-	-			
l	Proporsi PTK bersertifikat	%				-	-	-						-	-	-			
m	Proporsi PTK penggerak	%				-	-	-						-	-	-			
n	Pengalaman pelatihan guru	%				-	-	-						-	-	-			
3	Pendidikan Kesetaraan			2,000	2,000			170,000,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	1,500	1,500			170,000,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%				100	100	-						100	100	-			
b	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	-						100	100	-			
c	Angka partisipasi murni	%				100	100	-						100	100	-			
d	Kemampuan literasi	Nilai				-	-	-						-	-	-			
e	Kemampuan numerasi	Nilai				-	-	-						-	-	-			
f	Perbedaan skor literasi	Nilai				-	-	-						-	-	-			
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai				-	-	-						-	-	-			
h	Indeks iklim keamanan	Nilai				-	-	-						-	-	-			
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai				-	-	-						-	-	-			
j	Kecukupan formasi guru ASN	%				-	-	-						-	-	-			
k	Indeks Distribusi Guru	%				-	-	-						-	-	-			
l	Proporsi PTK bersertifikat	%				-	-	-						-	-	-			
m	Proporsi PTK penggerak	%				-	-	-						-	-	-			
n	Pengalaman pelatihan guru	%				-	-	-						-	-	-			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																	
1	Pendidikan Anak Usia Dini		2,750	2,750			1,130,000,000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN	2,800	2,800			1,550,000,000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi sekolah	%			100.36	100.36	570,000,000						100.00	100.00	570,000,000			
b	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%			91.32	91.32	110,000,000						100.00	100.00	130,000,000			
c	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%			100.00	100.00	100,000,000						100.00	100.00	500,000,000			
d	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%			100.00	100.00	100,000,000						100.00	100.00	100,000,000			
e	Kecukupan formasi guru ASN	%			100.00	100.00	100,000,000						100.00	100.00	100,000,000			
f	Indeks Distribusi Guru	%			100.00	100.00	150,000,000						100.00	100.00	150,000,000			
g	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-						-	-	-			
h	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-						-	-	-			
i	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-						-	-	-			
2	Pendidikan Dasar						16,600,000,000								17,650,000,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																	
	SD		15,000	15,000			11,900,000,000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN	15,100	15,100			12,800,000,000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%			100.00	100.00	3,500,000,000						100.00	100.00	3,800,000,000			
b	Angka partisipasi sekolah	%			100.00	100.00	3,500,000,000						100.00	100.00	3,800,000,000			
c	Angka partisipasi murni	%			100.00	100.00	3,500,000,000						100.00	100.00	3,800,000,000			
d	Kemampuan literasi	Nilai			83.33	83.33	350,000,000						100.00	100.00	350,000,000			
e	Kemampuan numerasi	Nilai			83.33	83.33	350,000,000						66.67	66.67	350,000,000			
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			66.67	66.67	250,000,000						56.67	56.67	250,000,000			
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			100.00	100.00	250,000,000						100.00	100.00	250,000,000			
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			100.00	100.00	100,000,000						100.00	100.00	100,000,000			
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			83.33	83.33	100,000,000						66.67	66.67	100,000,000			
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-						-	-	-			
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-						-	-	-			
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-						-	-	-			
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-						-	-	-			
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-						-	-	-			
	SMP		7,900	7,900			4,700,000,000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN	7,950	7,950			4,850,000,000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%			100.00	100.00	1,100,000,000						100.00	100.00	1,150,000,000			
b	Angka partisipasi sekolah	%			100.00	100.00	1,100,000,000						100.00	100.00	1,150,000,000			
c	Angka partisipasi murni	%			100.00	100.00	1,100,000,000						100.00	100.00	1,150,000,000			
d	Kemampuan literasi	Nilai			100.00	100.00	350,000,000						100.00	100.00	350,000,000			
e	Kemampuan numerasi	Nilai			100.00	100.00	350,000,000						100.00	100.00	350,000,000			
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			100.00	100.00	250,000,000						100.00	100.00	250,000,000			
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			100.00	100.00	250,000,000						100.00	100.00	250,000,000			
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			100.00	100.00	100,000,000						100.00	100.00	100,000,000			
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			100.00	100.00	100,000,000						100.00	100.00	100,000,000			
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-						-	-	-			
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-						-	-	-			
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-						-	-	-			
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-						-	-	-			
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-						-	-	-			
3	Pendidikan Kesetaraan		1,300	1,300			150,000,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	900	900			150,000,000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
a	Angka partisipasi kasar	%			100	100	-						100	100	-			
b	Angka partisipasi sekolah	%			100	100	-						100	100	-			
c	Angka partisipasi murni	%			100	100	-						100	100	-			
d	Kemampuan literasi	Nilai			-	-	-						-	-	-			
e	Kemampuan numerasi	Nilai			-	-	-						-	-	-			
f	Perbedaan skor literasi	Nilai			-	-	-						-	-	-			
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai			-	-	-						-	-	-			
h	Indeks iklim keamanan	Nilai			-	-	-						-	-	-			
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai			-	-	-						-	-	-			
j	Kecukupan formasi guru ASN	%			-	-	-						-	-	-			
k	Indeks Distribusi Guru	%			-	-	-						-	-	-			
l	Proporsi PTK bersertifikat	%			-	-	-						-	-	-			
m	Proporsi PTK penggerak	%			-	-	-						-	-	-			
n	Pengalaman pelatihan guru	%			-	-	-						-	-	-			

Tabel 3.2. Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil			2,962	2,606			1,305,186,000		APBD/APBN	Dinkes	3,110	2,767			1,319,156,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Orang				2,962	2,962	-						3,110	3,110	-			
b	Tablet tambah darah	Orang				266,580	234,540	-						279,900	249,030	-			
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang				2,962	2,962	3,540,000						3,110	3,110	3,720,000			
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Orang				2,962	2,962	29,500,000						3,110	3,110	31,000,000			
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Orang				2,962	2,962	6,235,000						3,110	3,110	6,665,000			
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Orang				2,962	2,962	2,349,000						3,110	3,110	2,511,000			
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	Orang				2,962	2,962	2,962,000						3,110	3,110	3,110,000			
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang				2,962	2,962	148,100,000						3,110	3,110	155,500,000			
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang				22	22	6,275,000						22	22	6,275,000			
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				172	172	1,100,100,000						174	174	1,104,100,000			
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				21	21	6,125,000						22	22	6,275,000			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			2,773	2,273			1,115,423,000		APBD/APBN	Dinkes	2,856	2,399			1,119,506,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Formulir Partograf	Orang				2,773	2,773	2,773,000						2,856	2,856	2,856,000			
b	Kartu ibu (rekam medis)	Orang				2,962	2,962	-						3,110	3,110	-			
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang				2,962	2,962	-						3,110	3,110	-			
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang				22	22	6,275,000						22	22	6,275,000			
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				172	172	1,100,100,000						174	174	1,104,100,000			
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				22	22	6,275,000						22	22	6,275,000			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			2,667	2,262			1,118,391,000		APBD/APBN	Dinkes	2,773	2,412			1,122,613,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Vaksin Hepatitis B0	Orang				2,667	2,667	-						2,773	2,773	-			
b	Vitamin K1 injeksi	Orang				2,667	2,667	-						2,773	2,773	-			
c	Salap/tetes mata antibiotik	Orang				2,667	2,667	3,074,000						2,773	2,773	3,190,000			
d	Formulir bayi baru lahir	Orang				2,667	2,667	1,333,500						2,773	2,773	1,386,500			
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang				2,667	2,667	1,333,500						2,773	2,773	1,386,500			
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang				2,962	2,962	-						3,110	3,110	-			
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang				22	22	6,275,000						22	22	6,275,000			
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				172	172	1,100,100,000						174	174	1,104,100,000			
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				22	22	6,275,000						22	22	6,275,000			
4	Pelayanan Kesehatan Balita			14,819	12,299			746,205,500		APBD/APBN	Dinkes	15,559	13,380			772,885,500		APBD/APBN	Dinkes
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Orang				14,819	14,819	88,914,000						15,559	15,559	93,354,000			
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Orang				14,819	14,819	7,409,500						15,559	15,559	7,779,500			
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang				2,962	2,962	-						3,110	3,110	-			
d	Vitamin A Biru	Orang				1,613	1,613	17,743,000						1,661	1,661	18,271,000			
e	Vitamin A Merah	Orang				13,812	13,812	151,932,000						14,226	14,226	156,486,000			
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Orang				2,082	1,941	-						2,144	1,999	-			
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Orang				2,082	1,922	-						2,144	1,980	-			
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang				2,082	1,930	-						2,144	1,988	-			
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Orang				1,924	1,696	-						1,982	1,747	-			
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Orang				1,924	1,749	-						1,982	1,801	-			
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Orang						-								-			
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Orang				1,924		-						1,982	1,851	-			
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Orang				1,942	1,740	-						1,961	1,792	-			
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Orang				1,942	1,758	-						1,961	1,811	-			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	o Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Orang						-								-			
	p Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Orang				14,819	14,819	96,792,000						15,559	15,559	101,370,000			
	q Peralatan Anafilaktik	Orang				14,819	14,819	244,365,000						15,559	15,559	256,575,000			
	r Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	s Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	t Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	u Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	v Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang				191	191	67,575,000						191	191	67,575,000			
	w Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang				169	169	46,975,000						169	169	46,975,000			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			3,970	3,573			651,200,000		APBD/APBN	Dinkes	4,089	3,761			657,745,000		APBD/APBN	Dinkes
	a Buku raport kesehatanku	Orang				3,970	3,970	99,250,000						4,089	4,089	102,225,000			
	b Buku pemantauan kesehatan	Orang				3,970	3,970	99,250,000						4,089	4,089	102,225,000			
	c Kuesioner skrining kesehatan	Orang				3,970	3,970	11,910,000						4,089	4,089	12,267,000			
	d Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Orang				3,970	3,970	3,970,000						4,089	4,089	4,089,000			
	e Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Orang				3,970	3,970	3,970,000						4,089	4,089	4,089,000			
	f Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	g Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	h Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	i Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	j Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	k Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang				191	191	67,575,000						191	191	67,575,000			
	l Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang				156	156	334,650,000						156	156	334,650,000			
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			72,685	53,060			1,398,375,000		APBD/APBN	Dinkes	74,865	57,646			1,438,769,000		APBD/APBN	Dinkes
	a Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman				40	40	1,050,000						40	40	2,000,000			
	b Alat ukur berat badan	Unit				72,685	72,685	5,250,000						74,865	74,865	5,250,000			
	c Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit				72,685	72,685	4,200,000						74,865	74,865	4,200,000			
	d Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit				72,685	72,685	735,000						74,865	74,865	735,000			
	e Alat : Tensimeter	Unit				72,685	72,685	11,550,000						74,865	74,865	11,550,000			
	f Alat : Glukometer	Unit				72,685	72,685	595,730,000						74,865	74,865	613,770,000			
	g Alat : Tes strip gula darah	Unit				72,685	72,685	325,584,000						74,865	74,865	335,328,000			
	h Alat : Lancet	Unit				72,685	72,685	348,480,000						74,865	74,865	359,040,000			
	i Alat : Kapas alkohol	Unit				72,685	72,685	36,300,000						74,865	74,865	37,400,000			
	j Alat : KIT IVA Tes	Unit				72,685	72,685	12,716,000						74,865	74,865	12,716,000			
	k Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang				21	21	105,000						21	21	105,000			
	l Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	m Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	n Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	o Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	p Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	q Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang				150	150	32,175,000						150	150	32,175,000			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			13,851	13,064			1,582,250,000		APBD/APBN	Dinkes	15,236	14,501			1,656,100,000		APBD/APBN	Dinkes
	a Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Orang				13,851	13,851	770,000,000						15,236	15,236	808,500,000			
	b Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Orang				13,851	13,851	7,000,000						15,236	15,236	7,350,000			
	c Buku kesehatan lansia	Orang				13,851	13,851	700,000,000						15,236	15,236	735,000,000			
	d Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	e Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
	f Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang				198	198	74,625,000						198	198	74,625,000			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			7,289	5,831			40,744,500		APBD/APBN	Dinkes	7,507	6,756			40,853,500		APBD/APBN	Dinkes
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman				42	42	1,050,000						42	42	1,050,000			
b	Tensimeter	Unit				21	21	11,550,000						21	21	11,550,000			
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang				21	21	3,644,500						21	21	3,753,500			
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			1,147	917			149,664,500		APBD/APBN	Dinkes	1,181	1,062			153,569,500		APBD/APBN	Dinkes
a	Alat : Glukometer	Unit				21	21	8,610,000						21	21	8,610,000			
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit				1,147	1,147	51,296,000						1,181	1,181	52,864,000			
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit				1,147	1,147	11,400,000						1,181	1,181	11,800,000			
d	Alat : Lancet	Unit				1,147	1,147	54,720,000						1,181	1,181	56,640,000			
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang				21	21	573,500						21	21	590,500			
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman				21	21	1,050,000						21	21	1,050,000			
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat			92	92			35,916,000		APBD/APBN	Dinkes	94	94			35,917,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku				20	20	20,000,000						20	20	20,000,000			
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Orang				92	92	2,800,000						94	94	2,800,000			
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang				20	20	220,000						20	20	220,000			
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media				40	40	46,000						40	40	47,000			
e	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang				4	4	600,000						6	6	600,000			
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			2,104	1,650			606,947,816		APBD/APBN	Dinkes	2,146	1,998			609,289,316		APBD/APBN	Dinkes
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media				21	21	4,305,000						21	21	4,305,000			
b	Reagen Zn TB	Orang				2,104	2,104	-						2,146	2,146	-			
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Orang				2,104	2,104	120,960,000						2,146	2,146	120,960,000			
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Orang				2,104	2,104	4,426,816						2,146	2,146	4,605,316			
e	Catridge tes cepat molekuler	Orang				20	20	442,900,000						20	20	445,000,000			
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	Orang				20	20	3,156,000						20	20	3,219,000			
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pedoman				20	20	1,000,000						20	20	1,000,000			
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang				6	6	5,400,000						6	6	5,400,000			
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang				4	4	300,000						4	4	300,000			
l	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang				21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)			3,272	2,617			274,566,500		APBD/APBN	Dinkes	3,337	3,003			278,231,500		APBD/APBN	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media				21	21	4,305,000						21	21	4,305,000			
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Orang				3,272	3,272	61,897,500						3,337	3,337	62,842,500			
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Orang				3,272	3,272	169,645,000						3,337	3,337	172,235,000			
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Orang				40	40	6,544,000						40	40	6,674,000			
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang				8	8	6,375,000						8	8	6,375,000			
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				8	8	6,375,000						8	8	6,375,000			
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				8	8	6,375,000						8	8	6,375,000			
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				8	8	6,375,000						8	8	6,375,000			
i	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				8	8	6,375,000						8	8	6,375,000			
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang				2	2	300,000						2	2	300,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		3,265	2,938			1,332,106,000		APBD/APBN	Dinkes	3,428	3,428			1,340,474,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Orang			3,265	3,265	-						3,428	3,428	-			
b	Tablet tambah darah	Orang			293,850	264,420	-						308,520	308,520	-			
c	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang			3,265	3,265	3,900,000						3,428	3,428	3,720,000			
d	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Orang			3,265	3,265	32,500,000						3,428	3,428	31,000,000			
e	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Orang			3,265	3,265	6,880,000						3,428	3,428	6,665,000			
f	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Orang			3,265	3,265	2,511,000						3,428	3,428	2,511,000			
g	Kartu ibu/rekam medis ibu	Orang			3,265	3,265	3,265,000						3,428	3,428	3,428,000			
h	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang			3,265	3,265	163,250,000						3,428	3,428	171,400,000			
i	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang			22	22	6,275,000						22	22	6,275,000			
j	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			176	176	1,107,250,000						178	178	1,109,200,000			
k	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			22	22	6,275,000						22	22	6,275,000			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2,941	2,558			1,122,741,000		APBD/APBN	Dinkes	3,029	3,029			1,124,779,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Formulir Partograf	Orang			2,941	2,941	2,941,000						3,029	3,029	3,029,000			
b	Kartu ibu (rekam medis)	Orang			3,265	3,265	-						3,428	3,428	-			
c	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang			3,265	3,265	-						3,428	3,428	-			
d	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang			22	22	6,275,000						22	22	6,275,000			
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			176	176	1,107,250,000						178	178	1,109,200,000			
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			22	22	6,275,000						22	22	6,275,000			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		2,883	2,565			1,126,018,000		APBD/APBN	Dinkes	2,998	2,998			1,128,199,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Vaksin Hepatitis B0	Orang			2,883	2,883	-						2,998	2,998	-			
b	Vitamin K1 injeksi	Orang			2,883	2,883	-						2,998	2,998	-			
c	Salep/tetes mata antibiotik	Orang			2,883	2,883	3,335,000						2,998	2,998	3,451,000			
d	Formulir bayi baru lahir	Orang			2,883	2,883	1,441,500						2,998	2,998	1,499,000			
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang			2,883	2,883	1,441,500						2,998	2,998	1,499,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
f	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang			3,265	3,265	-						3,428	3,428	-			
g	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang			22	22	6,275,000						22	22	6,275,000			
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			176	176	1,107,250,000						178	178	1,109,200,000			
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			22	22	6,275,000						22	22	6,275,000			
4	Pelayanan Kesehatan Balita		16,336	14,539			803,023,000		APBD/APBN	Dinkes	17,152	17,152			836,164,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Orang			16,336	16,336	98,016,000						17,152	17,152	102,912,000			
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Orang			16,336	16,336	8,168,000						17,152	17,152	8,576,000			
c	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang			2,883	2,883	-						2,998	2,998	-			
d	Vitamin A Biru	Orang			1,727	1,727	18,997,000						1,813	1,813	19,943,000			
e	Vitamin A Merah	Orang			14,795	14,795	162,745,000						15,534	15,534	170,874,000			
f	Vaksin imunisasi dasar: HBO	Orang			2,208	2,059	-						2,272	2,121	-			
g	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Orang			2,208	2,039	-						2,272	2,100	-			
h	Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang			2,208	2,048	-						2,272	2,109	-			
i	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Orang			2,041	1,799	-						2,102	1,853	-			
j	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Orang			2,041	1,855	-						2,102	1,911	-			
k	Vaksin imunisasi dasar: Campak	Orang			2,041	1,907	-						2,102	1,964	-			
l	Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Orang				-	-								-			
m	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Orang			2,020	1,846	-						2,081	1,901	-			
n	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Orang			2,020	1,865	-						2,081	1,921	-			
o	Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Orang					-								-			
p	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Orang			16,336	16,336	106,602,000						17,152	17,152	111,834,000			
q	Peralatan Anafilaktik	Orang			16,336	16,336	269,445,000						17,152	17,152	282,975,000			
r	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
s	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
t	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
u	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
v	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			191		67,575,000						191	191	67,575,000			
w	Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang			169		46,975,000						169	169	46,975,000			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		4,211	3,958			664,455,000		APBD/APBN	Dinkes	4,337	4,337			1,755,635,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Buku raport kesehatanku	Orang			4,211	4,211	105,275,000						4,337	4,337	650,550,000			
b	Buku pemantauan kesehatan	Orang			4,211	4,211	105,275,000						4,337	4,337	650,550,000			
c	Kuesioner skrining kesehatan	Orang			4,211	4,211	12,633,000						4,337	4,337	13,011,000			
d	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Orang			4,211	4,211	4,211,000						4,337	4,337	4,337,000			
e	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Orang			4,211	4,211	4,211,000						4,337	4,337	4,337,000			
f	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
h	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
i	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
k	Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			191	191	67,575,000						191	191	67,575,000			
l	Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang			156	156	334,650,000						156	156	334,650,000			
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		77,110	61,688			1,479,880,000		APBD/APBN	Dinkes	79,423	79,423			1,521,625,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			40	40	2,000,000						40	40	2,000,000			
b	Alat ukur berat badan	Unit			77,110	77,110	5,250,000						21	21	5,250,000			
c	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit			77,110	77,110	4,200,000						79,423	79,423	4,200,000			
d	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit			77,110	77,110	735,000						79,423	79,423	735,000			
e	Alat : Tensimeter	Unit			77,110	77,110	11,550,000						79,423	79,423	11,550,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
f	Alat : Glukometer	Unit			77,110	77,110	632,220,000						79,423	79,423	651,080,000			
g	Alat : Tes strip gula darah	Unit			77,110	77,110	345,408,000						79,423	79,423	355,712,000			
h	Alat : Lancet	Unit			77,110	77,110	370,080,000						79,423	79,423	381,120,000			
i	Alat : Kapas alkohol	Unit			77,110	77,110	38,550,000						79,423	79,423	39,700,000			
j	Alat : KIT IVA Tes	Unit			77,110	77,110	13,107,000						79,423	79,423	13,498,000			
k	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang			21	21	105,000						21	21	105,000			
l	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
m	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
n	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
o	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
q	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			150	150	32,175,000						150	150	32,175,000			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		16,760	16,096			1,733,642,500		APBD/APBN	Dinkes	18,436	18,436			1,815,062,125		APBD/APBN	Dinkes
a	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Orang			16,760	16,760	848,925,000						18,436	18,436	891,371,250			
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Orang			16,760	16,760	7,717,500						18,436	18,436	8,103,375			
c	Buku kesehatan lansia	Orang			16,760	16,760	771,750,000						18,436	18,436	810,337,500			
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
g	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
i	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			198	198	74,625,000						198	198	74,625,000			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		7,732	7,345			40,966,000		APBD/APBN	Dinkes	7,963	7,963			41,081,500		APBD/APBN	Dinkes
a	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			42	42	1,050,000						42	42	1,050,000			
b	Tensimeter	Unit			21	21	11,550,000						21	21	11,550,000			
c	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang			21	21	3,866,000						21	21	3,981,500			
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
g	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		1,216	1,155			156,895,000		APBD/APBN	Dinkes	1,252	1,252			160,913,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Alat : Glukometer	Unit			21	21	8,610,000						21	21	8,610,000			
b	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit			1,216	1,216	54,432,000						1,252	1,252	56,112,000			
c	Alat : Kapas Alkohol	Unit			1,216	1,216	12,100,000						1,252	1,252	12,500,000			
d	Alat : Lancet	Unit			1,216	1,216	58,080,000						1,252	1,252	60,000,000			
e	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang			21	21	608,000						21	21	626,000			
f	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			21	21	1,050,000						21	21	1,050,000			
g	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
h	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
j	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
k	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		96	96			35,918,000		APBD/APBN	Dinkes	98	98			35,919,000		APBD/APBN	Dinkes

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Target Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Target Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku			20	20	20,000,000						20	20	20,000,000			
b	Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Orang			96	96	2,800,000						98	98	2,800,000			
c	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang			20	20	220,000						20	20	220,000			
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media			40	40	48,000						40	40	49,000			
e	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
f	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang			6	6	600,000						6	6	600,000			
g	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		2,188	2,078			620,742,344		APBD/APBN	DINKES	2,231	2,231			624,796,861		APBD/APBN	DINKES
a	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media			21	21	4,305,000						21		4,305,000			
b	Reagen Zn TB	Orang			2,188	2,188	-						2,231	2,231				
c	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Orang			2,188	2,188	125,568,000						2,231	2,231	125,568,000			
d	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Orang			2,188	2,188	4,787,344						2,231	2,231	4,977,361			
e	Cartridge tes cepat molekuler	Orang			20	20	448,000,000						20	20	450,000,000			
f	Formulir pencatatan dan pelaporan	Orang			20	20	3,282,000						20	20	3,346,500			
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pedoman			20	20	1,000,000						20	20	1,000,000			
h	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang			10	10	9,000,000						12	12	10,800,000			
i	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
j	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
k	Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang			4	4	300,000						4	4	300,000			
l	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
m	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang			21	21	6,125,000						21	21	6,125,000			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		3,403	3,232			283,666,000		APBD/APBN	Dinkes	3,471	3,471			287,337,000		APBD/APBN	Dinkes
a	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media			21	21	4,305,000						21	21	4,305,000			
b	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Orang			3,403	3,403	64,260,000						3,471	3,471	65,205,000			
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Orang			3,403	3,403	176,120,000						3,471	3,471	178,710,000			
d	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Orang			40	40	6,806,000						40	40	6,942,000			
e	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang			8	8	6,375,000						8	8	6,375,000			
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			8	8	6,375,000						8	8	6,375,000			
g	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			8	8	6,375,000						8	8	6,375,000			
h	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang			8	8	6,375,000						8	8	6,375,000			
i	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang			8	8	6,375,000						8	8	6,375,000			
j	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang			2	2	300,000						2	2	300,000			

Tabel 3.3. Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			13,250	13,250			7,692,500,000	500,000,000	APBD (DAU, DAK)	DINAS PUTR	13,250	13,250			7,692,500,000	500,000,000	APBD (DAU, DAK, HIBAH)	DINAS PUTR
a	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR				1,300	1,300	7,425,000,000						1,300	1,300	7,425,000,000			
b	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR				1,300	1,300	7,425,000,000						1,300	1,300	7,425,000,000			
c	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga				50	50	267,500,000						50	50	267,500,000			
d	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga				50	50	267,500,000						50	50	267,500,000			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik			3,000	3,000			4,938,750,000	500,000,000	APBD (DAU, DAK)	DINAS PUTR	3,000	3,000			4,938,750,000	500,000,000	APBD (DAU, DAK, HIBAH)	DINAS PUTR
a	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga				500	500	4,488,750,000						500	500	4,488,750,000			
b	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga				-	-	-						-	-	-			
c	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga				500	500	4,488,750,000						500	500	4,488,750,000			
d	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga				100	100	450,000,000						100	100	450,000,000			
e	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga				100	100	450,000,000						100	100	450,000,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari		13,250	13,250			7,692,500,000	500,000,000	APBD (DAU, DAK, HIBAH)	DINAS PUTR	13,250	13,250			7,692,500,000	500,000,000	APBD (DAU, DAK, HIBAH)	DINAS PUTR
a	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR			1,300	1,300	7,425,000,000						1,300	1,300	7,425,000,000			
b	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Sambungan Rumah/SR			1,300	1,300	7,425,000,000						1,300	1,300	7,425,000,000			
c	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga			50	50	267,500,000						50	50	267,500,000			
d	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga			50	50	267,500,000						50	50	267,500,000			
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		3,000	3,000			4,938,750,000	500,000,000	APBD (DAU, DAK, HIBAH)	DINAS PUTR	3,000	3,000			4,938,750,000	500,000,000	APBD (DAU, DAK, HIBAH)	DINAS PUTR
a	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			500	500	4,488,750,000						500	500	4,488,750,000			
b	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga			-	-	-						-	-	-			
c	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga			500	500	4,488,750,000						500	500	4,488,750,000			
d	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga			100	100	450,000,000						100	100	450,000,000			
e	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga			100	100	450,000,000						100	100	450,000,000			

Tabel 3.4. Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			330	330			1,230,000,000		APBD	PERKIMTAN	330	330			1,291,500,000		APBD	PERKIMTAN
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah				3	3	30,000,000						3	3	31,500,000			
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				60	60	600,000,000						60	60	630,000,000			
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah				3	3	600,000,000						3	3	630,000,000			
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah				0	0	-						0	0	-			
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			30	30			630,000,000				30	30			660,000,000		APBD	PERKIMTAN
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah				0	0	-						0	0	-			
b	Subsidi uang sewa	Rumah				3	3	30,000,000						3	3	30,000,000			
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah				3	3	600,000,000						3	3	630,000,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																	
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		330	330			1,356,075,000		APBD	PERKIMTAN	330	330			1,423,878,750		APBD	PERKIMTAN
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah			3	3	33,075,000						3	3	34,728,750			
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah			60	60	661,500,000						60	60	694,575,000			
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah			3	3	661,500,000						3	3	694,575,000			
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah			0	0							0	0				
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		30	30			691,500,000		APBD	PERKIMTAN	30	30			724,575,000		APBD	PERKIMTAN
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah			0	0							0	0				
b	Subsidi uang sewa	Rumah			3	3	30,000,000						3	3	30,000,000			
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah			3	3	661,500,000						3	3	694,575,000			

Tabel 3.5. Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)			128.101	137			1,000,000,000		APBD	SATPOL PP	128.101	137			1,200,000,000		APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit				36	36	-						47	47	-			
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen				10	10	-						10	10	-			
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang				850	850	450,000,000						850	850	500,000,000			
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen				14	14	-						14	14	-			
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang				5	5	30,000,000						10	10	35,000,000			
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang				5	5	10,000,000						10	10	10,000,000			
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)			50,000	50,000			260,000,000	-	APBD	BPBD	50,000	50,000			175,000,000	-	APBD	BPBD
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen				1	1	85.000.000						1	1	-			
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang				50,000	50,000	75.000.000						50,000	50,000	75.000.000			
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang				50,000	50,000	100.000.000						50,000	50,000	100.000.000			
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit				-	-	-						-	-	-			
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			60	60			175,000,000	-	APBD	BPBD	65	65			185,000,000	-	APBD	BPBD
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit				15	15	100.000.000						15	15	100.000.000			
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang				45	45	75.000.000						50	50	85.000.000			
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			208	208			330,000,000	-	APBD	BPBD	223	223			355,000,000	-	APBD	BPBD
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko				1	1	50.000.000						1	1	50.000.000			
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang				175	175	60.000.000						185	185	75.000.000			
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen				1	1	50.000.000						1	1	50.000.000			
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan				1	1	50.000.000						1	1	50.000.000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan				30	30	120.000.000						35	35	130.000.000			
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)			12,000	12,000			327,500,000				12,000	12,000			500,550,000			
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan				6	6	164,000,000		APBD	DAMKAR			6	6	196,800,000		APBD	DAMKAR
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen				5	5	1,000,000		APBD	DAMKAR			5	5	120,000,000		APBD	DAMKAR
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit				15	15	100,000,000		APBD	DAMKAR			15	15	120,000,000		APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang				10	10	62,500,000		APBD	DAMKAR			10	10	63,750,000		APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan				6	6	-		APBD	DAMKAR			6	6	-		APBD	DAMKAR
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan				6	6	-		APBD	DAMKAR			6	6	-		APBD	DAMKAR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																	
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)		128.101	150			1,200,000,000		APBD	SATPOL PP	128.101	200			1,400,000,000		APBD	SATPOL PP
a	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit			47	47	-						47	47	-			
b	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen			10	10	-						10	10	-			
c	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang			850	850	500,000,000						850	850	500,000,000			
d	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen			14	14	-						14	14	-			
e	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang			10	10	45,000,000						10	10	55,000,000			
f	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti	orang			10	10	15,000,000						10	10	25,000,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)																	
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		50,000	50,000			175,000,000	-	APBD	BPBD	50,000	50,000			175,000,000	-	APBD	BPBD
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen			1	1	-						1	1	-			
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang			50,000	50,000	75.000.000						50,000	50,000	75.000.000			
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang			50,000	50,000	100.000.000						50,000	50,000	100.000.000			
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit			-	-	-						-	-	-			
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		65	65			185,000,000	-	APBD	BPBD	65	65			185,000,000	-	APBD	BPBD
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	unit			15	15	100.000.000						15	15	100.000.000			
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang			50	50	85.000.000						50	50	85.000.000			
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		223	223			365,000,000	-	APBD	BPBD	243	243			365,000,000	-	APBD	BPBD
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko			1	1	50.000.000						1	1	50.000.000			
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang			180	180	70.000.000						195	195	85.000.000			
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen			1	1	50.000.000						1	1	50.000.000			
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan			1	1	50.000.000						1	1	50.000.000			
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan			40	40	145.000.000						45	45	155.000.000			
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		12,000	12,000			572,100,000				12,000	12,000			572,100,000			
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan			6	6	229,600,000		APBD	DAMKAR			6	6	229,600,000		APBD	DAMKAR
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen			5	5	140,000,000		APBD	DAMKAR			5	5	140,000,000		APBD	DAMKAR
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit			15	15	140,000,000		APBD	DAMKAR			15	15	140,000,000		APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang			10	10	62,500,000		APBD	DAMKAR			10	10	62,500,000		APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan			6	6	-		APBD	DAMKAR			6	6	-		APBD	DAMKAR
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			6	6	-		APBD	DAMKAR			6	6	-		APBD	DAMKAR

Tabel 3.6. Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Maluku Tenggara 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			131	131			327,500,000		APBD	DINAS SOSIAL	181	181			538,500,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang				131	131	10,500,000						181	181	40,500,000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang				131	131	9,500,000						181	181	10,000,000			
c	Penyediaan Permakanan	Orang				131	131	105,000,000						181	181	163,000,000			
d	Penyediaan Sandang	Orang				131	131	25,000,000						181	181	70,500,000			
e	Penyediaan Alat Bantu	Orang				20	20	97,500,000						25	25	100,500,000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				131	131	10,000,000						181	181	50,500,000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang				131	131	10,000,000						181	181	25,500,000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Orang				131	131	10,000,000						181	181	25,500,000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				131	131	10,000,000						181	181	10,500,000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				5	5	10,000,000						5	5	10,500,000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				131	131	10,000,000						181	181	10,500,000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				131	131	10,000,000						181	181	10,500,000			
m	Layanan Rujukan	Orang				2	2	10,000,000						2	2	10,500,000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti			250	250			382,500,000		APBD	DINAS SOSIAL	290	290			588,500,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang				250	250	15,000,000						290	290	50,500,000			
b	Penyediaan Permakanan	Orang				250	250	160,000,000						290	290	213,000,000			
c	Penyediaan Sandang	Orang				250	250	30,000,000						290	290	70,500,000			
d	Penyediaan Alat Bantu	Orang				5	5	97,500,000						5	0	100,500,000			
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				250	250	10,000,000						290	290	50,500,000			
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				250	250	10,000,000						290	290	25,500,000			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Orang				250	250	10,000,000						290	290	25,500,000			
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				250	250	10,000,000						290	290	10,500,000			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	Orang				5	5	10,000,000						5	5	10,500,000			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				250	250	10,000,000						290	290	10,500,000			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				250	250	10,000,000						290	290	10,500,000			
l	Layanan Rujukan	Orang				5	5	10,000,000						5	5	10,500,000			
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Orang				0	0	-						0	0	-			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Orang				0	0	-						0	0	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Orang				0	0	-						0	0	-			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti			121	121			327,500,000		APBD	DINAS SOSIAL	136	136			538,500,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang				121	121	15,000,000						136	136	50,500,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Orang				0	0	-						0	0	-			
c	Penyediaan Permakanan	Orang				121	121	105,000,000						136	136	163,000,000			
d	Penyediaan Sandang	Orang				121	121	30,000,000						136	136	70,500,000			
e	Penyediaan Alat Bantu	Orang				10	10	97,500,000						10	10	100,500,000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				121	121	10,000,000						136	136	50,500,000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				121	121	10,000,000						136	136	25,500,000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Orang				121	121	10,000,000						136	135	25,500,000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				121	0	10,000,000						136	136	10,500,000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	Orang				4	0	10,000,000						4	4	10,500,000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				121	0	10,000,000						136	136	10,500,000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				121	0	10,000,000						136	136	10,500,000			
m	Layanan Rujukan	Orang				121	0	10,000,000						136	136	10,500,000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan						0	-							0	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru						0	-							0	-			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti			57	57			280,500,000		APBD	DINAS SOSIAL	77	77			463,200,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang				57	57	15,000,000						77	77	50,500,000			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Orang				0	0	-						0	0	-			
c	Penyediaan Permakanan	Orang				57	57	105,000,000						77	77	163,000,000			
d	Penyediaan Sandang	Orang				57	57	30,000,000						77	77	70,500,000			
e	Penyediaan Alat Bantu	Orang				5	5	50,500,000						5	5	50,700,000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang				57	57	10,000,000						77	77	50,500,000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang				57	57	10,000,000						77	77	25,500,000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Orang				57	57	10,000,000						77	77	-			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang				57	57	10,000,000						77	77	10,500,000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	Orang				3	3	10,000,000						3	3	10,500,000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang				57	57	10,000,000						77	77	10,500,000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang				57	57	10,000,000						77	77	10,500,000			
m	Layanan Rujukan	Orang				3	3	10,000,000						3	3	10,500,000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Orang						-						0	0	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Orang						-						0	0	-			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			237	237			224,000,000		APBD	DINAS SOSIAL	377	377			357,500,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan permakanan	Orang				237	237	100,000,000						377	377	175,500,000			
b	Penyediaan sandang	Orang				237	237	50,000,000						377	377	75,500,000			
c	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit				2	2	25,000,000						2	2	25,500,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
d	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang				50	50	35,000,000						80	80	50,500,000			
e	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang				35	35	14,000,000						55	55	30,500,000			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant di Luar Panti		181	181			544,500,000		APBD	DINAS SOSIAL	181	181			550,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang			181	181	41,000,000						181	181	40,500,000			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang			181	181	10,200,000						181	181	10,500,000			
c	Penyediaan Permakanan	Orang			181	181	163,300,000						181	181	164,000,000			
d	Penyediaan Sandang	Orang			181	181	71,000,000						181	181	71,500,000			
e	Penyediaan Alat Bantu	Orang			25	25	101,000,000						25	25	101,500,000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang			181	181	51,000,000						181	181	51,500,000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Orang			181	181	26,000,000						181	181	26,500,000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant	Orang			181	181	26,000,000						181	181	26,500,000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang			181	181	11,000,000						181	181	11,500,000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang			5	5	11,000,000						5	5	11,500,000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang			181	181	11,000,000						181	181	11,500,000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang			181	181	11,000,000						181	181	11,500,000			
m	Layanan Rujukan	Orang			2	2	11,000,000						2	2	11,500,000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti		290	290			593,500,000		APBD	DINAS SOSIAL	290	290			599,500,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang			290	290	50,500,000						290	290	51,000,000			
b	Penyediaan Permakanan	Orang			290	290	213,500,000						290	290	214,000,000			
c	Penyediaan Sandang	Orang			290	290	70,500,000						290	290	71,000,000			
d	Penyediaan Alat Bantu	Orang			5	5	101,000,000						5	5	101,500,000			
e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang			290	290	51,000,000						290	290	51,500,000			
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang			290	290	26,000,000						290	290	26,500,000			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlarant	Orang			290	290	26,000,000						290	290	26,500,000			
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang			290	290	11,000,000						290	290	11,500,000			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	Orang			5	5	11,000,000						5	5	11,500,000			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang			290	290	11,000,000						290	290	11,500,000			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang			290	290	11,000,000						290	290	11,500,000			
l	Layanan Rujukan	Orang			5	5	11,000,000						5	5	11,500,000			
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Orang			0	0	-						0	0	-			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Orang			0	0	-						0	0	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Orang			0	0	-						0	0	-			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti		136	136			544,500,000		APBD	DINAS SOSIAL	136	136			550,500,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang			136	136	51,000,000						136	136	51,500,000			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Orang			0	0	-						0	0	-			
c	Penyediaan Permakanan	Orang			136	136	163,500,000						136	136	164,000,000			
d	Penyediaan Sandang	Orang			136	136	71,000,000						136	136	71,500,000			
e	Penyediaan Alat Bantu	Orang			10	10	101,000,000						10	10	101,500,000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang			136	136	51,000,000						136	136	51,500,000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang			136	136	26,000,000						136	136	26,500,000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Orang			136	135	26,000,000						136	135	26,500,000			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang			136	136	11,000,000						136	136	11,500,000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	Orang			4	4	11,000,000						4	4	11,500,000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang			136	136	11,000,000						136	136	11,500,000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang			136	136	11,000,000						136	136	11,500,000			
m	Layanan Rujukan	Orang			136	136	11,000,000						136	136	11,500,000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan					0	-							0	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru					0	-							0	-			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		77	77			468,400,000		APBD	DINAS SOSIAL	77	77			482,500,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	Orang			77	77	51,000,000						77	77	51,500,000			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Orang				0	-						0	0	-			
c	Penyediaan Permakanan	Orang			77	77	163,500,000						77	77	164,000,000			
d	Penyediaan Sandang	Orang			77	77	71,000,000						77	77	71,500,000			
e	Penyediaan Alat Bantu	Orang			5	5	50,900,000						5	5	60,000,000			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Orang			77	77	51,000,000						77	77	51,500,000			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Orang			77	77	26,000,000						77	77	26,500,000			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Orang			77	77	-						77	77	-			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang			77	77	11,000,000						77	77	11,500,000			
j	Akses ke Layanan Pendidikan	Orang			3	3	11,000,000						3	3	11,500,000			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang			77	77	11,000,000						77	77	11,500,000			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang			77	77	11,000,000						77	77	11,500,000			
m	Layanan Rujukan	Orang			3	3	11,000,000						3	3	11,500,000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Orang			0	0	-						0	0	-			

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan																	
	o Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Orang			0	0	-						0	0	-			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		402	402			364,000,000		APBD	DINAS SOSIAL	402	402			371,000,000		APBD	DINAS SOSIAL
a	Penyediaan permakanan	Orang			402	402	180,000,000						402	402	185,000,000			
b	Penyediaan sandang	Orang			402	402	76,000,000						402	402	76,500,000			
c	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit			2	2	26,000,000						2	2	26,500,000			
d	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang			85	85	51,000,000						85	85	51,500,000			
e	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang			60	60	31,000,000						60	60	31,500,000			

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan

sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
 - a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM.

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pembirisan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Maluku Tenggara, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - 5) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - 6) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - 7) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga

negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?

8) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layananannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
- 6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
- 2) Bagaimana SPM diposisikan?
- 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
- 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
- 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
- 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?

Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Maluku Tenggara masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Maluku Tenggara secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Maluku Tenggara.

PENJABAT BUPATI MALUKU
TENGARA,

Cap/ttd

JASMONO